

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA

Penyusunan Skripsi untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. E.C. Gendut Sukarno,MS.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman SH,M.Hum Selaku SesProgdi sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua orang tua kami tercinta, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan tersebut dengan kebaikan pula. Harapan penulis semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	Xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xii
ABSTRAKSI.....	Xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Tentang Polrestabes Surabaya .....	8
1.5.2 Tinjauan Tentang Anak.....	11
1.5.3 Pengertian Diversi.....	13
1.5.4 Dasar Hukum Penerapan Diversi Menurut Hukum Perlindungan anak .....	16

1.5.5 Proses Pelaksanaan Diversi Yang Digunakan Di Polrestabes Surabaya Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	17
1.6 Metode Penelitian .....	32
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	33
1.6.2 Sumber Data .....	33
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	35
1.6.4 Metode Analisis Data.....	36
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA.....</b>	<b>39</b>
2.1 Hasil Penelitian Penanganan Diversi Yang Digunakan Di POLRESTABES Surabaya Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	39
2.2 Alur Penanganan Diversi Yang Digunakan Di Polrestabes Surabaya Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	41
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIVERSI YANG DIBERLAKUKAN TIDAK ADIL .....</b>	<b>45</b>
3.1 Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	45
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ketika Hak-Hak Diversinya Dilanggar .....	51

BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Zandy wirayuda

NPM : 0771010045

Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 06 Juli 1989

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI POLRESTABES SURABAYA

ABSTRAKSI

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan), dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah pertama pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?, Kedua, bagaimana perlindungan hukum anak Diversi yang diberlakukan tidak adil? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu polisi, petugas balai pemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi polisi memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus

anak. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada polisi, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak



tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai sucesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti

kehidupan.<sup>1</sup> Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa.

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan.<sup>2</sup>

Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul “Situasi Anak-Anak di Dunia 1995” mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia.<sup>3</sup>

Menurut laporan itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer. Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik

---

<sup>2</sup>[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=235&Itemid=235](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=235), diakses hari Selasa, 18 Oktober 2011, 21.00

<sup>3</sup> Ibid,

dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>4</sup>

*Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.<sup>5</sup> Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas: Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ibid,

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994 hal.20

Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi.

Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Satreskrim, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum

baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polrestabes Surabaya. Inilah nantinya yang akan penulis kaji pada tahapan penulisan.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Surabaya ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum anak diversi yang diperlakukan tidak adil ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Surabaya.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak diversi yang diberlakukan tidak adil

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dan dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

b. Teoritis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai konsep diversi.

## 1.5 Kajian Pustaka.

### 1.5.1 Tinjauan Tentang POLRESTABES Surabaya

Sebelum kemerdekaan, Kesatuan Kepolisian yang memiliki wilayah hukum kota besar Surabaya disebut Hofdbiro Soerabaja atau yang lebih dikenal dengan lafal awam “Hopbiro”.

Tahun 1945 (jaman Jepang), dalam kota Surabaya berdiri Pusat Kantor Polisi Kota Besar Surabaya atau sebutan lain pada masa itu adalah Surabaya KEISATSUHON SHO.

Tahun 1946 sampai dengan 1948 bulan April dalam rangka konsolidasi pemerintahan Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya ditarik ke kementrian Dalam Negri untuk selanjutnya kesatuan Kepolisian Kota Besar dihapuskan.

Tahun 1949 dibentuk kembali suatu kesatuan Kepolisian yang mencakup Wilayah Keresidenan Surabaya dengan nama Kepolisian Keresidenan Surabaya.

Berdasarkan SK Presiden No. 290/ 164 tahun 1964 Kantor Kepolisian Karesidenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan kesatuan kesatuan kewilayahan yang ada dibawahnya juga dirubah masing-masing menjadi :

- Kantor-kantor Polisi Seksi dan Kabupaten diganti menjadi Komando Resort Kepolisian 1011 sampai dengan 1020.
- Kantor-kantor Polisi Kawedanan diganti nama menjadi Komando Distrik Kepolisian.
- Kantor Polisi Kecamatan diganti nama menjadi Komando Sektor Kepolisian.

Berdasarkan SKEP Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) X Jatim tanggal 4 September 1968 Daerah Komdin Kepol (Komando Daerah Inspeksi Kepolisian) 101 surabaya yang semula membawahi seluruh daerah bekas Karesidenan Surabaya dipecah menjadi 2 daerah komdim :

1. Daerah KMS menjadi Daerah Komdim 101 Kota Surabaya yang semula dibagi menjadi 6 komres yaitu :
  - a. Komres 1011 Tanjung Perak
  - b. Komres 1012 Sidodadi
  - c. Komres 1013 Bubutan
  - d. Komres 1014 Ambengan
  - e. Komres 1015 Kaliasin
  - f. Komres 1016 Darmo



Dilebur menjadi 3 Komres, yaitu :

- a. Komres 1011 Bubutan dengan 6 sektor
- b. Komres 1012 Kaliasin dengan 6 sektor
- c. Komres 1013 Sidodadi dengan 5 sektor

1) Daerah bekas karesidenan Surabaya menjadi daerah Komdim 108 Surabaya meliputi ; Komres Gresik 1081, Sidoarjo 1082, Mojokerto dan Jombang.

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol. 41 SK Kapolri 71 tanggal 24 April 1971 tentang organisasi Komdak memutuskan Komdin 101 Kota Madya Surabaya dirubah menjadi Komtabes Kepol 101.

Berdasarkan surat keputusan No. Pol. Kep 02 VII 1973 tanggal 10 juli 1973 tentang pembubaran Komtabes Kepolisian 101 Kota Madya Surabaya menjadi Kota Besar Surabaya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep 65 VI 76 tentang pembentukan Komando Kewilayahan Kota Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang wilayahnya meliputi :

- 1. Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan
- 2. Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara
- 3. Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur

Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep 727/ XII/ 92 Kepol. Resort kota KPPP Jatim Tanjung Perak yang sebelumnya dibawah POLDA kemudian ada dibawah Polwitabes Surabaya.

Pada tanggal 1 Juli 2010 yang bertepatan dengan HUT POLRI, Polwiltabes Surabaya diganti nama menjadi POLRESTABES Surabaya (Polisi Resort Kota Besar Surabaya) yang beralamat Jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya.

#### 1.5.2 Tinjauan Tentang Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. ( Selanjunya disingkat dengan UU Pengadilan Anak ) Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa :

##### § Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

##### § Pasal 1 angka 2a UU Pengadilan Anak

##### 1. Anak yang melakukan tindak pidana atau

2. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. UU Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum

yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin“.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal

### 1.5.3 Pengertian Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana<sup>6</sup>

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka

---

<sup>6</sup> [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses hari Sabtu 16 April 2011, 18.00 wib.

) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara <sup>7</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.

Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan social. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative Justice.

---

<sup>7</sup> Ibid,h180

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;

5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

#### 1.5.4 Dasar Hukum Penerapan Diversi Menurut Hukum Perlindungan Anak

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rulis.<sup>8</sup> Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak properti anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reflika Aditama, Jakarta, 2009, h 127

<sup>9</sup> Ibid, h 34

Dengan demikian Mengingat pada Pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi pembedaan perlakuan dan sanksi pidana dapat diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 22 – 34 dan UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 16 – 18 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang

#### 1.5.5 Proses Pelaksanaan Diversi Yang Digunakan Di Polrestabes Surabaya terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang peradilan dan perlindungan anak, maka pengadilan anak sebagai pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum, berwenang menangani segala perkara dari anak sebagai pelaku tindak pidana Terhadap anak pelaku tindak pidana yang tidak diproses melalui peradilan anak akan lebih menjunjung tinggi kepentingan anak pelaku tindak pidana dan bertujuan untuk menghindari proses pengadilan yang pada umumnya akan berakibat buruk pada kondisi fisik maupun mental anak.

Sebagai alternatif penanganannya pihak Polrestabes melalui kewenangannya dapat melakukan upaya Diversi walaupun dalam



prakteknya terdapat berbagai kendala sehingga upaya Diversi ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Penerapan Diversi merupakan solusi terbaik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, karna Diversi ini lebih memihak kepentingan terbaik bagi anak, dengan cara mengalihkan dari proses hukum formal, seperti misalnya dengan pengawasan Lembaga yang terkait, sehingga diharapkan, dengan tidak dimasukkan ke “ Sekolah Kriminal “ atau ditahan, si anak dapat menyadari kesalahannya dengan memperbaiki sikap yang lebih bertanggung jawab, juga anak dapat terhindar pula dari stigma negatif atau buruk dari lingkungan sekitar, sehingga masa depan anak lebih terjamin.

Penanganan anak yang berkonflik hukum, terutama yang melakukan kejahatan ringan, perlu disertai dengan jiwa yang memikirkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama bagi masa depan anak, hal ini berarti, dalam menangani kasus anak yang berkonflik hukum, bukan hanya menyangkut kepastian hukum saja, tetapi diperlukan orang-orang berwenang yang menangani masalah anak yang mempunyai perhatian khusus terhadap anak, tidak hanya tentang teori anak.<sup>10</sup>

Dalam menangani perkara hukum yang menyangkut anak-anak dalam hal ini Polrestabes mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak serta UU No. 23

---

<sup>10</sup> Agung D. Syahputra, *Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, h 36

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pengaturan tentang perlindungan anak, para pihak yang terkait dalam penanganan peradilan anak seharusnya tidak hanya menggunakan tindakan Represif tetapi juga upaya Preventif sebelum adanya korban peradilan anak.

Penegakan hak anak sebenarnya diatur jelas dari instrumen internasional dan nasional yang menerapkan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Model penyelesaian Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian yaitu kewenangan hak Diskresi untuk menghentikan perkara dalam batas waktu yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan meliputi usia anak yang terikat pertanggung jawaban pidana, pendidikan, faktor psikologis, kriteria kasus yang tergolong tindak pidana ringan, dan faktor paling penting adalah kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan dihentikan proses perkaranya.<sup>11</sup>

Kewenangan Kepolisian di Indonesia tentang Diversi dalam instrumen nasional belum diatur secara jelas, baik pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maupun dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dengan demikian yang dapat menjadi acuan dasar hukum awal yaitu Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>11</sup> Rica Sofiana, *Penyidikan Tindak Pidana pada Kasus Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005, h 34

Kepolisian yang menetapkan dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,

Ketentuan diatas menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Telegram Kabareskrim POLRI No. Pol TR/1124/XI/2006 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi dan korban yang isinya antara lain adalah:

- a. Dalam Menangani Kasus Anak (pelaku/korban) agar setiap penyidik mengkedepankan azas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang penanganannya.
- b. Penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan pertumbuhan anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal / pengadilan.
- c. Menghentikan praktek-praktek yang tidak profesional dan proporsional dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak.
- d. Mengembangkan kemitraan atau berjejaring dengan berbagai pihak yg memiliki perhatian dan kepedulian terhadap anak guna mendapatkan berbagai masukan yg dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yg komprehensif dalam menyelesaikan kasus anak.
- e. Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice dalam memproses kasus anak.
- f. Setiap kasus yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga dapat dijauhkan anak tersebut dari proses hukum formal, agar trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses hukum formal / pengadilan<sup>12</sup>

Pada akhirnya dari hasil kondisi demikian ini, telah menjadi agenda proses pelaksanaan diversi yang digunakan di Polrestabes Surabaya, serta dapat menjadi sebuah alternatif penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, namun masih harus dikhususkan kembali, dalam arti penetapan secara tersendiri tentang pemeriksaan kasus anak tersebut dengan orang dewasa, adapun yang membedakan penerapan tata cara pemeriksaan kasus anak tersebut dengan orang dewasa adalah sebagai berikut:

a. Penyidik

Pengusutan (opspring) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

---

<sup>12</sup> TR Kabareskrim No. Pol : TR/1124/XI/2006, Butir DDD.3.

kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHP yang lengkapnya berbunyi:

1) Penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

- a) Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Polri;
- b) Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Pasal 41 ayat 1). Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat 2, yaitu :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan biasanya polisi wanita (Polwan), namun tidak menutup kemungkinan bagi polisi pria.<sup>13</sup>

Akan tetapi didalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian karena jabatannya dapat menjadi penyidik. Dan dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan pasal 41 butir 3 tugas penyidikan dapat dibebankan kepada :

- a) Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau
- b) Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan ( Pasal 42 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 ). Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik, efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, pendekatan secara simpatik, tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau

---

<sup>13</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia(Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h 101

trauma pada anak. Dasar ketentuan penyidik terhadap perkara anak-anak masih sangat terikat berdasar UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga kegiatan Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tetap berkuat pada ketentuan undang-undang tersebut. Berdasar UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 5, mengatur bahwa bagi pelaku anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, maka penyidik akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya, ataupun kepada Departemen sosial anak pelaku tersebut apabila tidak dapat dibina oleh orang tua/Wali atau orang tua asuhnya.

Sedangkan bagi pelaku anak yang umurnya 8 tahun atau lebih, maka kondisi umur ini sebagai dasar bagi penyidik apabila telah terpenuhi pelimpahan perkara, maka akan segera menyerahkan/melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut umum anak, untuk dilakukan penuntutan.

Sebenarnya pihak Kepolisian bekeinginan pula untuk tidak mengharuskan melimpahkan perkara anak kepada pihak Kepolisian. Penyidik bekeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak ini apabila pihak korban menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menunda ataupun menghentikan pemeriksaan perkara anak.

Beberapa penyidik menyatakan bahwa Diversi dapat dilakukan diterapkan pada praktek peradilan pidana anak, asalkan didukung atau disetujui oleh para pihak, baik pihak pelaku dan pihak keluarga korban, dan disertakan syarat asal kejahatan tersebut

ringan, masyarakat tidak berontak dan antara pelaku dan korban damai serta orang tua pelaku dan kondisi lingkungan mendukung pelaku agar pelaku dapat berubah.<sup>14</sup>

#### b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, serta Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Tahap penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat penyidikan, harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak atau pekerja sosial dan sebagainya. Saat penyidikan dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran penyidikan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

---

<sup>14</sup> Setya Wahyudi, Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, <http://isjd.Pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/PDE>, diakses hari Senin 22 November 2011, 22.00



Bahasa yang dipergunakan Polisi dalam Penyidikan dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi atau perlakuan keras atau kasar terhadap anak selama penyidikan berlangsung. Tempat penyidikan dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak mersa ketakutan. Teknik penyidikan yang menggunakan proses Diversi yang digunakan oleh polisi terhadap pelaku anak adalah dengan menginformasikan kepada orang tua atau wali anak, bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat.

Polisi juga menyampaikan kepada anak dan orang tua/wali mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial yang kompeten dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut. Selanjutnya Polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan diri polisi itu sendiri.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:

- 1) Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Ini dapat menimbulkan trauma pada anak.
- 2) Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak seperti “pencuri”, “maling”, “pembongkaran” dan lain-lain.
- 3) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan penyidikan terhadap anak.
- 4) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.<sup>15</sup>

#### c. Penangkapan

Seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ayat (1) bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang perlu diperhatikan disini berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan anak
- 2) Untuk kepentingan masyarakat

Dan kedua hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam surat perintah penahanan.

---

<sup>15</sup> Marlina, Op.Cit., h 39

Dengan disebutkannya secara tegas pada Pasal 45 tersebut bahwa salah satu alasannya melakukan penahanan memperhatikan juga kepentingan dan hak anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan anak tetaplah menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penahan. Penahanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dan diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus Anak. Artinya sebagai upaya terakhir adalah sebagai berikut :

Penahanan lebih sering banyak mudarat daripada manfaatnya. Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi anak dan bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam hak anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak” ( UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (b)).

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990 menyebutkan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/ penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup.

Khusus tindakan penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan trhadap anak, seperti:

- 1) Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah.

- 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya
- 5) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup.

Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- b) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- c) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada disekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan
- d) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar
- e) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang memperlukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap

- f) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya
- g) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan anak demi menjaga jati diri dan identitas anak
- h) Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan.
- i) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/wali dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan dikantor polisi<sup>16</sup>

#### d. Penahanan

Penahanan anak merupakan upaya terakhir, sebagaimana tertuang di UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disana disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pemidanaan penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan jika penahanan dilakukan, penyidik wajib memisahkan anak dari tahanan dewasa dan tetap memenuhi hak-hak anak.

Pada setiap surat perintah penahanan yang disampaikan oleh penyidik, umumnya perintah penahanan didasarkan pada tiga alasan. Pertama, dikhawatirkan akan melarikan diri. Kedua, akan menghilangkan barang bukti dan ketiga dikhawatirkan akan mengulangi lagi tindak pidana. Tiga alasan ini menjadi alasan umum yang didasarkan pada KUHAP pasal 21 ayat 1. Namun dapat

---

<sup>16</sup> Ibid, h 88

dilakukan penangguhan ppat dilakukan penangguhan penahanan terhadap anak dengan jaminan dari pengacara atau orang tua.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya, maka anak dapat dititipkan pada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial yang dimaksud itu tidak ada, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan dngan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa.

Pasal 45 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Sulit didalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah. Dalam tindakan penahanan, penyidik dapat meminta bantuan pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 45 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997, adalah kepentingan anak dan atau

kepentingan masyarakat. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Bila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik mental dan sosial anak. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu singkat.<sup>17</sup>

#### 1.6. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari peneliti ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu system dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan<sup>19</sup>

Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa

---

<sup>17</sup> Artikel Pledoi Media Komunikasi Dan Tranformasi Hak Anak, Jauhkan Anak Dari Penjara, Edisi I/ Volume I, 2010, h 28

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 17

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, h 2

adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya.

#### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat serta pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis<sup>20</sup>

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang diatur berdasarkan UU tentang anak yang meliputi pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Sehingga bisa diperjelas bahwa metode yang digunakan penelitian menggunakan hukum normatif dan tipe peneliti yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum deskriptif kualitatif.

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut : Data sekunder

---

20 M. Syamsudin, Operasioanal Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h 57



yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut<sup>21</sup>

- 1) Sumber Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Dan juga UU pendukung lainnya serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan yang terdiri dari :
  - a) C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita, Jakarta, 2004.
  - b) Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
  - c) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
  - d) Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Reflika Aditama, Jakarta 2009.
  - e) Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
  - f) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
  - g) Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
  - h) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009.
  - i) Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- 3) Sumber bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya terdiri dari :
  - a) Echols, John.M, Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1990.
  - b) Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, h 14

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis akan menganalisa penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di peroleh dari mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi lengkap.

Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian dari Polrestabes Surabaya serta pihak-pihak terkait yang mengerti masalah anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>22</sup> H.Zainuddin Ali, op.cit., h 176

<sup>23</sup> M. Syamsuddin, op.cit., , h 101

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>24</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan Hukum (Proposal)

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini<sup>25</sup>. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode

---

<sup>24</sup> H.Zainuddin Ali, op.cit., h 107

<sup>25</sup> Ibid, h 225

penelitian yang berupa berupa pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, lokasi dan waktu penelitian, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II :

Bab ini menguraikan mengenai Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di POLRESTABES Surabaya. Dalam bab ini penulis akan menguraikan isi dalam dua sub bab. Pada sub bab pertama penulis akan menerangkan mengenai Proses Pelaksanaan Diversi Yang Digunakan Di Polrestabes Surabaya Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sedangkan sub bab ke dua menerangkan mengenai Skema Penanganan Diversi Yang Digunakan Di Polrestabes Surabaya Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

## BAB III :

Bab ini menguraikan mengenai Perlindungan Hukum anak diversi yang diberlakukan tidak adil, Dalam bab ini penulis akan menguraikan isi dalam dua sub bab, pada sub bab pertama penulis menerangkan mengenai Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sedangkan sub bab ke dua menerangkan mengenai Upaya

Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan  
Hukum Ketika Hak-Hak Diversinya Dilanggar

#### BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dan Penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini

